

BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN KABUPATEN PANGANDARAN

2.1 Kondisi Geografis

Kawasan Kabupaten Pangandaran terletak antara 7°40'20" LS - 7°50'20" LS dan 108°30' BT - 108°40' BT dengan presentase daratan yang lebih luas dari pada perairannya, walaupun terdapat banyak wisata air yang ditonjolkannya, dimana kawasan seluas 1.065,67 km² ini terbagi atas daratan seluas seluas 983,72 km² dan perairan seluas 81,95 km². Selayaknya wilayah yang terdapat di Indonesia, Kawasan Kabupaten Pangandaran juga memiliki iklim tropis dua musim, yakni kemarau dan hujan. Suhu udara di Kawasan Pangandaran mencapai rata-rata mencapai 27°C dan curah hujan nya mencapai 3.196 mm per tahun. Namun, Kawasan Pangandaran memiliki topografi yang beragam mulai dari dataran rendah 0 meter di bagian utara atau daerah tepi pantai hingga daerah pegunungan di bagian selatan mencapai 763 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah nya pun beragam, mulai dari tanah latosol di daerah pegunungan hingga regosol di daerah pantai, hingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di Kawasan ini. Terdapat pula pulau kecil seperti Pulau Nusakambangan, Pulau Pamujan dan Pulau Karang Bodas.²⁰

2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kawasan Pangandaran pada tahun 2008 menurut *Profil Pangandaran* pada buku *Pangandaran Dari Masa ke Masa* berjumlah 380.325 jiwa. Kemudian pada tahun 2014 menurut *Laporan Penyusunan Dokumentasi Pelestarian Nilai Budaya* bab Gambaran umum Kabupaten Pangandaran berjumlah 422.586 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran menduduki peringkat ke-24 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

²⁰Arsip Bappeda Ciamis (2011) dalam Nugroho, Prasetyo, Suryono, Muh. Yusuf. Strategi Pengembangan Ekowisata di Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Pasca Tsunami. *Jurnal of Marine Research*. No 2.(2).2013 hlm.14 [online] melalui : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jmr>

Tabel 1 Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pangandaran

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2015	390.483	0.56
2016	392.817	0.60
2017	395.098	0.58
2018	397.187	0.53
2019	422.615	0.62
2020	427.095	0.64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pagandaran

Dibandingkan dengan jumlah penduduk saat dilakukan sensus pada tahun 2010, sebanyak 379.518 jiwa yang terus naik pada lima tahun setelahnya, kemudian mengalami perlambatan mencapai 0.58% pada tahun 2017. Hal ini berarti kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dikatakan berhasil dilakukan di Kawasan Pangandaran.

2.3 Kondisi Sosial

Tradisi hajatan laut dan ronggeng gunung yang sekarang mengalami modernisasi menjadi ronggeng aman telah ada sejak zaman pra-kolonial. Warisan budaya ini menandakan bahwa terdapat perilaku adaptasi dan perubahan sosial yang menjadi peran penting masyarakat lokal dalam pelestariannya. Hajatan laut sebagai kegiatan adat yang khas di Pangandaran begitu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk bisa menyaksikan acara otentik itu.

Menurut sajian data yang dipaparkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangandaran, kondisi sosial berupa tingkat pendidikan, struktur pekerjaan dan dampak pariwisata terhadap perekonomian lokal terjadi kesenjangan sosial yang begitu terlihat di kalangan masyarakat. Sebab dan akibat yang terjadi dari kesenjangan pendapatan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pekerja pemerintah ataupun sektor wisata dengan para petani dan nelayan yang pendapatannya tidak stabil. Hal itu berkaitan erat dengan akses pendidikan, kesehatan, pola pikir dan kualitas hidup, ketersediaan pekerjaan dan perbedaan regional, yakni daerah di Kawasan Pangandaran yang belum tersentuh pariwisata sedikit tertinggal dengan infrastruktur yang kurang memadai seperti halnya jalan yang rusak dan fasilitas umum lainnya. Interaksi sosial antara masyarakat lokal dan

wisatawan juga mempengaruhi perkembangan pada kondisi sosial masyarakat melalui pelestarian di era modernisasi dan globalisasi.

2.4 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pada suatu wilayah berkaitan pula dengan kondisi sosial masyarakatnya. Suatu wilayah dapat dilihat pada persebaran penduduk yang bekerja di suatu wilayah, karena upaya pembangunan yang ada selalu diusahakan pada perluasan kesempatan kerja agar masyarakat dapat merasakan langsung dari manfaat pembangunan yang berjalan. Indikator mata pencaharian masyarakat tercipta antara angkatan kerja dan keahlian dalam penyerapan tenaga kerja.

Rata-rata persebaran lapangan pekerjaan di Kawasan Pangandaran berdasarkan lapangan usaha yaitu, ibu rumah tangga, pelajar, pensiunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepolisian RI (POLRI), perdagangan, petani/pekebun, peternak, nelayan/perikanan, industri, konstruksi, transportasi, karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan BUMD, honorer, buruh harian lepas, buruh tani/perkebunan, buruh nelayan/perikanan, buruh peternakan, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang listrik, tukang batu, tukang kayu, tukang sol sepatu, tukang las/pandai besi, tukang jahit, tukang gigi, penata rias, penata busana, penata rambut, mekanik, seniman, tabib, perancang busana, penterjemah, imam masjid, pendeta, wartawan, ustadz/mubaligh, juru masak, bupati, wakil bupati, anggota DPRD Prov., anggota DPRD Kab/Kota, dosen, guru, pengacara, notaris, arsitek, akuntan, konsultan, dokter, bidan, perawat, apoteker, penyiar radio, pelaut, peneliti, sopir, pialang, paranormal, pedagang desa, kepala desa, wiraswasta, ialah laki-laki yang berjumlah 211.220 orang sementara perempuan berjumlah 422.615 orang terdapat juga sisa pekerja lainnya yang tidak terdata serta penganggur.²¹

Kesejahteraan dan pemerataan perekonomian di Kawasan Pangandaran dapat dilihat melalui indikator pertumbuhan produk domestik regional bruto atau lapangan usaha. Hal tersebut berfokus pada adanya lahu inflasi, PDRB per-kapita, Indeks Gini, serta persentase status sosial masyarakat di strata bawah, menengah

²¹Pangandaran, "Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021."

dan atas. Selain hal tersebut produk domestik regional bruto atau lapangan usaha dapat menjelaskan mengenai indeks pembangunan serta perkembangan manusia.

Struktur perekonomian pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat melalui nilai presentase tambah bruto terhadap sektor hasil PDRB. Berdasarkan hasil pada tahun 2016-2019 kinerja PDRB pada Kawasan Pangandaran menunjukkan presentase pekerja yang konsisten. Tahun 2019, PDRB berdasarkan harga berlaku mencapai nominal Rp. 11,322 triliun, serta naik sebesar Rp. 956,782 miliar atau 9,23% dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 10,366 triliun.

Inflasi pada tahun 2019, atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh Nilai PDRB sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan volume produk barang/jasa. Oleh karena itu, analisis lebih tepat dilakukan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 7,750 triliun, meningkat sebesar Rp. 435,66 miliar atau 5,95% dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 7,315 triliun. Ini menunjukkan bahwa volume produk barang/jasa secara umum meningkat dan perekonomian Kabupaten Pangandaran berkembang positif selama dua tahun terakhir. Hingga tahun 2019, sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi Kabupaten Pangandaran, dengan nilai tambah sebesar Rp. 3,065 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 1,814 triliun atas dasar harga konstan, meski kontribusinya sedikit menurun dibandingkan sektor lain seperti Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sektor pertanian tetap stabil meski terkena gejolak moneter, menyumbang 23,41% dari PDRB tahun 2019, turun dari 24,01% pada tahun 2018. Penurunan kontribusi ini disebabkan oleh pertumbuhan sektor lain yang lebih cepat dan berkurangnya lahan pertanian karena kebutuhan pemukiman.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga signifikan, dengan nilai tambah Rp. 2,283 triliun pada tahun 2019, meningkat dari Rp. 2,085 triliun tahun 2018. Sektor ini menunjukkan peningkatan volume barang/jasa yang diperdagangkan, didominasi oleh sub-sektor perdagangan besar dan eceran serta sub-sektor hotel dan restoran yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sektor industri di Kabupaten Pangandaran masih relatif rendah, dengan nilai tambah Rp. 540,706 miliar pada tahun 2019, meningkat sebesar 7,72% dari tahun

sebelumnya. Meski pertumbuhannya lambat, sektor industri secara bertahap menunjukkan kemampuan untuk mengubah struktur ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dengan target akhir 67,42 poin. Pada tahun 2019, IPM mencapai 68,21 poin, melampaui target dan menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan. Pada bidang pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,58 tahun (2018) menjadi 7,67 tahun (2019). Fokusnya adalah penuntasan buta huruf, penurunan angka *drop out*, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Pada Bidang Kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) naik dari 78,22 tahun (2018) menjadi 78,65 tahun (2019). Peningkatan kesehatan juga telah dicapai melalui penurunan kematian bayi dan balita serta perbaikan gizi balita. Sementara daya beli masyarakat, meningkat dari 66,81 poin (2018) menjadi 68,32 poin (2019). Namun, indikator ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kebijakan harga BBM. Secara keseluruhan, kemajuan adanya pembangunan pada Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, dikarenakan hal tersebut berfokus pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat serta kesejahteraan hidup pada masyarakat.

2.5 Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran

Proses pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru dimulai dari aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang ingin mendapatkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat dan efisien. Masyarakat Pangandaran merasa bahwa pemekaran dari Kabupaten Ciamis akan membawa banyak manfaat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Tahapan awal pemekaran diawali dengan pembentukan panitia pemekaran yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya. Panitia ini bertugas mengumpulkan data dan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan bahwa wilayah Pangandaran layak menjadi

kabupaten sendiri. Mereka mengadakan berbagai pertemuan dan diskusi untuk merumuskan visi, misi dan tujuan pemekaran.²²

Panitia pemekaran pun menyusun studi kelayakan yang mencakup aspek demografi, ekonomi, sosial dan budaya. Studi ini menunjukkan bahwa Pangandaran memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang jika diberikan status sebagai kabupaten. Proposal pemekaran kemudian diajukan ke Pemerintah Kabupaten Ciamis dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proposal pemekaran Pangandaran kemudian diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelayakan pemekaran yang diajukan. Proses ini melibatkan berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPR RI.

Proses panjang dan berliku yang dilalui untuk pemekaran Pangandaran, pemerintah pusat pun akhirnya menyetujuinya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Undang-undang ini secara resmi menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru yang terpisah dari Kabupaten Ciamis.

Peresmian Kabupaten Pangandaran dilakukan pada 25 Oktober 2012 yang dihadiri berbagai pejabat tinggi dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, serta tokoh-tokoh masyarakat dan warga Pangandaran. Sejak saat itu, Pangandaran resmi menjalankan pemerintahan sendiri dengan segala kewenangan otonomi daerahnya.

Program yang dilakukan Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis.

Salah satu potensi terbesar Pangandaran adalah sektor pariwisata. Dengan berbagai daya tarik wisata alam yang indah seperti Pantai Pangandaran, Green Canyon, dan Cagar Alam, pemerintah daerah terus mengembangkan sektor ini

²²Lubis et al., *Pangandaran Dari Masa Ke Masa*.

untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi fokus pengembangan ekonomi lokal. Proses panjang pemekaran Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan daerah otonomi baru. Dengan semangat otonomi daerah, Pangandaran terus bergerak maju, menghadapi tantangan, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Kabupaten Pangandaran telah melalui sejarah panjangnya hingga berdiri menjadi daerah otonomi baru yang memiliki pemerintahan sendiri. Saat ini Pangandaran telah mempunyai lambang daerah. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 pada tanggal 27 juni 2013, menjelaskan mengenai gambaran umum kawasan Kabupaten Pangandaran yaitu²³ :



Gambar 2 Logo Kabupaten Pangandaran

- a. Bintang, yang mempunyai arti ketuhanan yang maha esa.
- b. Kujang, yang mempunyai arti sebagai simbol pusaka Padjadjaran dengan 5 lubang pada gambarnya yang melambangkan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Kujang pada lambang Kabupaten Pangandaran berwarna hitam, merah dan kuning yang melambangkan kemakmuran, keberanian dan keadilan.
- c. Pohon kelapa yang memiliki nilai ekonomi pada semua bagian pohonnya berwarna hijau sebagai gambaran sumber daya alam di Kabupaten Pangandaran. Pohon kelapa banyak dijumpai di seluruh kawasan Kabupaten

²³Adeng. Potensi Budaya di Pangandaran

Pangandaran. Hal ini selaras dengan pendapatan sebagian masyarakat yang berpenghasilan dari membuat gula merah dari pohon kelapa selain dari gula merah yang berasal dari pohon nira (kawung).

- d. Gunung berwarna hijau melambangkan daerah Pangandaran memiliki kondisi tanah yang subur, hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai tanaman tumbuh pada hampir seluruh kawasan. Hal ini dapat dilihat pada arsip BPS bahwa presentase daratan di Kabupaten Pangandaran lebih banyak dibandingkan lautan.
- e. Pagar atau benteng yang berjumlah sepuluh, melambangkan sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran sebagai penopang yang memberi kekuatan.
- f. Pondasi berjumlah 21, diartikan sebagai kekuatan dasar melambangkan Kabupaten Pangandaran pada Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2012.
- g. Gelombang berjumlah 17 dan 7 yang berwarna putih menggambarkan sumber daya alam perairan di Kabupaten Pangandaran berupa laut, sungai, kolam, tambak dan rawa-rawa. Sementara 17 gelombang lainnya melambangkan tanggal deklarasi Kabupaten Pangandaran oleh presidium pada 17 Juli 2007.
- h. Bunga berwarna merah sebagai lambang keabadian dan keadilan yang merata berdasarkan dasar negara sebagai sebuah harapan bersamaan dengan tulisan Kabupaten Pangandaran yang berwarna hitam.
- i. Simbol identitas Kabupaten Pangandaran
 - 1) Warna : hitam.
 - 2) Pita berwarna kuning : persatuan dan kesatuan.

Jaya Karsa Makarya Praja. Jaya, berarti kemenangan dan keunggulan. Karsa berarti ide atau daya cipta yang selalu unggul sukses dalam pembangunan. Makarya, berarti mendirikan dan mengerjakan pekerjaannya dengan indah dan megah. Praja, negeri dengan pemerintahan yang kuat dan tangguh.



Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Pangandaran

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Adeng, dkk (2018) memaparkan bahwa luas kawasan Kabupaten Pangandaran ialah 168.509 Ha dengan luas lautnya mencapai 67.340 Ha serta panjang pantainya seluas 91 Km. Batasan–batasan kawasan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dibatasi oleh :
 - a. Kabupaten Ciamis ; Kecamatan Banjarsari (Desa Ciulu, Pasawahan, Cikupa) dan Kecamatan Pamarican (Desa Sidarahayu, Purwadadi dan Sidamulih).
 - b. Kabupaten Tasikmalaya ; Kecamatan Karangjaya (Desa Citalahab) dan Kecamatan Cineam (Desa Cisarua).
2. Sebelah Timur dibatasi oleh :
 - a. Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah ; Kecamatan Kedungreja (Desa Tambaksari, Sidanegara, Rejamulya) dan Kecamatan Patimuan (Desa Sidamukti, Patimuan, Rawaapu, Purwodadi).
3. Sebelah Barat dibatasi oleh :
 - a. Kabupaten Tasikmalaya ; Kecamatan Cikatomas (Desa Pasanggrahan), Kecamatan Panca Tengah (Desa Neglasari, Tawang, Panca Wangi, Mekarsari), Kecamatan Cikalong (Desa Cimanuk) dan Kecamatan Salopa (Desa Mulyasari).

4. Sebelah Selatan dibatasi oleh :
- a. Laut Samudera Indonesia.

Tabel 2 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Parigi	111,2	10	53	122	399
2.	Cijulang	94,3	7	38	90	253
3.	Cimerak	190,2	11	51	99	357
4.	Cigugur	117,8	7	39	64	200
5.	Langkaplancar	205,5	15	66	115	413
6.	Mangunjaya	31,9	5	28	47	233
7.	Padaherang	112,7	14	60	142	442
8.	Kalipucang	104,2	9	29	80	290
9.	Pangandaran	75,5	8	33	89	243
10.	Sidamulih	90,4	7	33	67	258
Jumlah		1.133,7	93	430	915	3.188

Sumber : Rencana Tata Wilayah Kabupaten Pangandaran Hingga 2038

Sekaitan dengan dasa persebaran desa di setiap kecamatan, kondisi topografi di Kabupaten Pangandaran juga beragam, yakni berada pada ketinggian 0-100 MDPL dengan elevasi nya yang semakin tinggi dari arah selatan ke utara, kecuali di bagian barat pesisir karena wilayahnya perbukitan karst. Kondisi di setiap kecamatan, diuraikan dalam tabel sebagai berikut²⁴ :

Tabel 3 Topografi Kawasan Pangandaran

No.	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1.	Parigi	Desa dengan dataran rendah, parigi merupakan daerah yang bervariasi, hal tersebut dapat dilihat ketinggiannya yang mencapai 5-500 MDPL, selain desa parigi, adapun beberapa desa yang berada di dataran rendah yaitu, Karangjati, Cibenda, Karangbenda, dan Ciliang.
2.	Cijulang	Merupakan wilayah pesisir pantai, yang memiliki ketinggian 2-185 MDP, dan termasuk kedalam dataran rendah/pantai.
3.	Cimerak	Memiliki kondisi geografis dengan bagian selatan dominan tebing yang curam serta pada bagian utara merupakan perbukitan kapur dengan ketinggian termasuk kedalam dataran rendah yaitu, 3-80 MDPL.
4.	Cigugur	Daerah yang bukan termasuk pesisir melainkan perbukitan, wilayah tersebut memiliki ketinggian dengan rata-rata 200-500 MDPL.
5.	Langkaplancar	Sama halnya dengan Cigugur, Langkaplancar merupakan daerah yang termasuk kedalam dataran tinggi, hal tersebut

²⁴Pemerintah Kabupaten Pangandaran, "Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021," 2020.

		dapat dilihat dari rata-rata ketinggiannya yang mencapai 400-1.000 MDPL.
6.	Mangunjaya	Mangunjaya merupakan daerah, dan tidak masuk kedalam kategori pesisir, dan pada daerah mangunjaya memiliki tingkat ketinggian yang cukup rendah yaitu berkisar pada 13-17 MDPL.
7.	Padaherang	Sama halnya dengan daerah Mangunjaya, wilayah Pandaherang bukan termasuk kedalam daerah pesisir. Wilayah Pandaherang memiliki ketinggian bervariasi yaitu sekitar 13-600 MDPL. Adapun daerah yang berada di dataran tinggi yaitu Bojongsari, yang berada pada ketinggian 245 MDPL, dan desa Panyutran 600 MDPL. Sedangkan daerah lainnya yang berada pada kecamatan Pandaherang relatif sama karena berkisar antara 13- 24 MDPL
8.	Kalipucang	Kalipucang merupakan wilayah yang bervariasi, hal tersebut dapat dilihat dari ketinggiannya yang mencapai 2 sampai 400 mdpl. Adapun desa yang berada di dataran tinggi yaitu desa Ciparakan yang berada pada ketinggian 400 MDPL dan desa Emplak yang berada pada ketinggian 160 MDPL sementara daerah lain ya merupakan dataran rendah yang berkisar pada 2-8 MDPL.
9.	Pangandaran	Pangandaran merupakan daerah pesisir pantai sebagai daya tarik wisatanya, selain pesisir pantai yang memiliki keindahan Pangandaran juga memiliki cagar alam yang dilindungi. Pangandaran sendiri berada pada ketinggian 3-500 MDPL
10.	Sidamulih	Sidamulih merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai memiliki ketinggian yang berkisar pada 3-250 MDPL, merupakan daerah dengan dataran sedang. Adapun beberapa daerah atau desa yang berada di dataran tinggi pada kecamatan Sidamulih yaitu desa Kersaratu dan desa Kalijati

Sumber : RKPD Tahun 2021

Penduduk Kabupaten Pangandaran tersebar di 10 Kecamatan dan menempati peringkat ke 18 jumlah desa terbanyak di Jawa Barat, yakni sebanyak 93 desa.²⁵ Dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Pangandaran, hampir 16 persen penduduknya banyak tinggal di Kecamatan Padaherang mengalahkan Kecamatan Parigi sebagai ibu kota kabupaten yang hanya 10.84 persen. Sementara distribusi penduduk paling kecil terdapat di Kecamatan Cigugur sebanyak 5.40 persen.

Faktor penting dari indikator demografi ialah angka beban ketergantungan, yakni dalam rentang tahun 2015-2018 angka nya mengalami peningkatan, dimana angka beban tanggungan di Pangandaran sebesar 48,40 persen pada tahun 2018.

²⁵Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat Pasal 3 ayat (1) huruf a-j perihal cakupan wilayah

Hal ini berarti setiap 100 jiwa penduduk produktif masih harus menanggung beban sekitar 48 penduduk tidak produktif dengan kisaran usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran yang terus meningkat setiap tahun menandakan bahwa Kawasan ini semakin diminati sebagai tempat tinggal. Angka harapan hidup juga menunjukkan semakin meningkat yang berarti bahwa kualitas hidup penduduk semakin baik.